

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian mencakup data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pada periode 2016 dan 2017 secara berturut-turut agar lebih menjelaskan kondisi pada saat ini. Alasan memilih perusahaan manufaktur karena jumlah perusahaan manufaktur sangat banyak, setiap tahunnya sekitar 143 perusahaan.

Pemilihan perusahaan manufaktur ini dapat memberikan gambaran untuk jenis perusahaan yang lainnya dan pada penelitian ini menggunakan variabel CSR yang akan lebih berpengaruh pada perusahaan manufaktur. Selain itu, perusahaan manufaktur ini melakukan kegiatan operasionalnya dari tahap awal hingga akhir dengan sendiri. Dari bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Hal ini, kemungkinan besar akan membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara memperbesar beban-beban perusahaan. Sehingga, pajak yang dibayarkan akan lebih rendah dari yang seharusnya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan menggunakan 78 perusahaan yang sesuai kriteria.

Adapun kriteria pemilihan sampel adalah :

- Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan 2017 dan menerbitkan laporan tahunan yang dapat diakses di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember dan lengkap dengan data yang terkait dengan variabel-variabel dalam penelitian.
- Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian pada tahun 2016 dan 2017 karena, apabila perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tersebut tidak dibebankan untuk membayar pajak dan dapat membuat hasil penelitian ini menjadi tidak wajar.

**Tabel 4.1**  
**Proses pemilihan sampel**

<b>Kriteria perusahaan</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	143
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap	(33)
Perusahaan manufaktur yang mengalami rugi	(53)
<b>Sampel yang digunakan 57 x 2 tahun</b>	<b>114</b>
Sampel dengan outlier	(36)
<b>Jumlah sampel yang diolah</b>	<b>78</b>

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh 78 perusahaan dari 286 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 dan 2017. Terdapat data outlier sebanyak 36 sehingga total sampel yang dapat diolah adalah 78 perusahaan.

## B. Uji Kualitas Data

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif ini digunakan untuk mengetahui tentang jumlah data, range, nilai mean, nilai minimal, nilai maksimal, varian, standar deviation, skewness, kurtosis dari setiap variabel yang ada dalam sebuah penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah *Corporate Social Responsibility Disclosure*, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak (ETR).

**Tabel 4.2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRD	78	.09	.38	.2222	.07214
KI	78	.02	.93	.4905	.25340
PDKI	78	.00	1.00	.4166	.14899
KA	78	1	4	2.91	.488
KUA	78	0	1	.54	.502
TA	78	.03	.54	.2519	.07690
Valid N (listwise)	78				

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa sampel pada penelitian ini berjumlah 78 perusahaan. Variabel CSRD memiliki nilai minimal sebesar 0,09, nilai maksimal sebesar 0,38, nilai rata-rata sebesar 0,2222 dan standar deviasi sebesar 0,07214. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimal sebesar 0,02, nilai maksimal sebesar 0,93, nilai rata-rata sebesar 0,4905 dan standar deviasi sebesar 0,25340. Variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai minimal sebesar 0,00, nilai maksimal sebesar 1,00, nilai rata-rata sebesar 0,4166 dan

standar deviasi sebesar 0,14899. Variabel komite audit memiliki nilai minimal sebesar 1, nilai maksimal 4, nilai rata-rata sebesar 2,91 dan standar deviasi sebesar 0,488. Variabel kualitas audit memiliki nilai minimal 0, nilai maksimal 1, nilai rata-rata sebesar 0,54 dan standar deviasi sebesar 0,502. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimal sebesar 0,03, nilai maksimal 0,54, nilai rata-rata 0,2519 dan standar deviasi sebesar 0,07690.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk melihat dan menilai kualitas data. Pengujian ini merupakan suatu persyaratan yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda karena tidak semua data dapat dilakukan regresi. Oleh karena itu, pengujian ini dipenuhi untuk menghindari adanya bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini *adalah One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		78
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07046436
	Absolute	.084
	Positive	.059
	Negative	-.084
	Kolmogorov-Smirnov Z	.745
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.635

Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai sig > 0,05. Hasil pengujian normalitas memperoleh nilai sig sebesar 0,635 yang berarti nilai signifikansinya > 0,05 yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas adalah pengujian untuk melihat apakah ada korelasi antar variabel bebas (*independent*) dalam suatu model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.203	.057		3.553	.001		
CSR	.381	.129	.357	2.943	.004	.792	1.263
KI	-.067	.033	-.219	-2.004	.049	.975	1.026
PDK	-.038	.056	-.074	-.681	.498	.985	1.016
KA	.009	.018	.057	.516	.607	.940	1.064
KUA	-.025	.018	-.162	-1.355	.180	.818	1.222

Syarat tidak terjadi multikolinieritas adalah Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali,2011). Table 4.4 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF variabel independennya < 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independennya, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

### c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan sebagai pengujian untuk mengetahui adanya penyimpangan atau tidaknya pada suatu data. Maksud penyimpangan disini adalah hubungan antara satu dengan yang lainnya (Nazaruddin dan Basuki, 2016).

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

	Unstandardized Residual
Test Value(a)	-.00168
Cases < Test Value	39
Cases >= Test Value	39
Total Cases	78
Number of Runs	43
Z	.684
Asymp. Sig. (2-tailed)	.494

Uji run-test merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam mengatasi autokorelasi. Syarat lolos uji run-test memiliki nilai sig  $> 0,05$ . Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai sig  $0,494 > 0,05$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

**d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Uji ini sangat penting dilakukan karena uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

			CSR	KI	PDK	KA	KUA	TA
Spearman's rho	CSR	Correlation Coefficient	1.000	.112	.082	.229(*)	.405(**)	.073
		Sig. (2-tailed)	.	.329	.474	.043	.000	.528
		N	78	78	78	78	78	78
	KI	Correlation Coefficient	.112	1.000	-.019		.115	-.200
		Sig. (2-tailed)	.329	.	.870	.828	.315	.079
		N	78	78	78	78	78	78
	PDK	Correlation Coefficient	.082	-.019	1.000	.029	.123	-.084
		Sig. (2-tailed)	.474	.870	.	.801	.282	.467
		N	78	78	78	78	78	78
	KA	Correlation Coefficient	.229(*)	.025	.029	1.000	.053	.010
		Sig. (2-tailed)	.043	.828	.801	.	.645	.931
		N	78	78	78	78	78	78
	KUA	Correlation Coefficient	.405(*)	.115	.123	.053	1.000	.006
		Sig. (2-tailed)	.000	.315	.282	.645	.	.956
		N	78	78	78	78	78	78

Lolos uji heteroskedastisitas apabila nilai sig > 0,05 (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa nilai sig masing-masing variabel > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### C. Uji Hipotesis dan Analisis Data

#### 1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017).



**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.400(a)	.160	.102	.07287	2.331

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,102 yang berarti variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 10,2% oleh *corporate social responsibility disclosure*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Sisanya 89,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji nilai F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan mampu mempengaruhi variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Uji nilai F dilakukan dengan menggunakan kriteria, apabila *p value* (sig) < 0,05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.073	5	.015	2.750	.025(a)
	Residual	.382	72	.005		
	Total	.455	77			

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian memiliki nilai sig  $0,025 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan *coroporate social responsibility disclosure*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 3. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji *t*)

Uji nilai *t* digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai alpha dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Kriteria hipotesis diterima apabila nilai sig  $< 0,05$  dan koefisien regresi searah dengan hipotesis.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji *t***

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.203	.057		3.553	.001
CSR	.381	.129	.357	2.943	.004
KI	-.067	.033	-.219	-2.004	.049
PDKI	-.038	.056	-.074	-.681	.498
KA	.009	.018	.057	.516	.607
KUA	-.025	.018	-.162	-1.355	.180

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan persamaan regresi adalah :

$$TA = 0,203 + 0,381CSR - 0,067KI - 0,038PDKI + 0,009KA - 0,025KUA + e.$$

Hasil pengujian hiotesis sebagai berikut :

**a. Uji Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)**

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, variabel *corporate social responsibility disclosure* memiliki nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi (beta) sebesar 0,381. Maka dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima.

**b. Uji hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)**

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, variabel kepemilikan institusional memiliki nilai sigifikansi  $0,049 < 0,05$  dan nilai koefisien regresi (beta) sebesar -0,067. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) ditolak.

**c. Uji Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>)**

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi  $0,498 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi (beta) sebesar -0,038. Maka dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) ditolak.

#### d. Uji Hipotesis (H<sub>4</sub>)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, variabel komite audit memiliki nilai signifikansi  $0,607 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi (beta) sebesar  $-0,009$ . Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H<sub>4</sub>) ditolak.

#### e. Uji Hipotesis (H<sub>5</sub>)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, variabel kualitas audit memiliki nilai signifikansi  $0,180 > 0,05$  dan nilai koefisien regresi (beta) sebesar  $-0,025$ . Maka dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H<sub>5</sub>) ditolak.

**Tabel 4.10**  
**Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

Kode	Hipotesis	Keterangan
H <sub>1</sub>	<i>Corporate social responsibility disclosure</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Diterima
H <sub>2</sub>	Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H <sub>3</sub>	Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H <sub>4</sub>	Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H <sub>5</sub>	Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Ditolak

#### D. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility disclosure*, kepemilikan institusional, proporsi dewan

komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur tahun 2016 dan 2017.

### **1. Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama menunjukkan bahwa *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian ( $H_1$ ) diterima. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu perusahaan menyadari bahwa kontrak sosial dengan masyarakat dibutuhkan dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan dan dengan adanya CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015), Lanis dan Richardson (2012) dan Watson (2011) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial cenderung untuk mencegah kegiatan penghindaran pajak dengan menunjukkan strategi CSR, termasuk etika dan perilaku bisnis dan komitmen investasi sosial dari suatu perusahaan merupakan elemen dasar kegiatan CSR yang memiliki pengaruh pada penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Davis (2013) Femitasari (2014)

yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## **2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian (H<sub>2</sub>) ditolak. Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja manajemen untuk dapat memperoleh laba yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Simmons (2006) menemukan bahwa Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan irwansyah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Merslythalia dan Lasmana (2016), Syeldita dan Niki (2015), dan Cahya dan Alit (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian ( $H_3$ ) ditolak. Hal ini dikarenakan meningkatnya proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan dilakukan hanya untuk memenuhi peraturan yang ada di dalam perusahaan, sehingga banyak atau tidaknya komisaris independen tidak menjamin bahwa fungsi pengawasan dalam perusahaan semakin efektif atau tidak efektif. Adanya pemegang saham mayoritas juga masih sangat memegang peranan yang penting dalam perusahaan terutama dalam hal mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2015), Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa besar kecilnya proporsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak efektif dalam upaya mencegah tindakan penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan Alit (2014), Kurniasih dan

Sari (2013), Syeldila dan Niki (2015) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **4. Pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran Pajak**

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian (H<sub>4</sub>) ditolak. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan seperti minimnya pengalaman anggota. Sriwedari (2009) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini kemungkinan dikarenakan rata-rata jumlah komite audit di setiap perusahaan sama, baik perusahaan besar maupun kecil yang sudah *listing* sehingga jumlah komite audit tidak bisa menjadi jaminan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, komite audit hanya membantu para dewan komisaris independen sebagai penghubung antara para dewan komisaris dengan auditor eksternal sebuah perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Fadhilah (2014) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Swingly dan Sukartha (2014) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan



ketidakmampuan anggota komite audit independen menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat terdeteksi oleh komite audit. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013), Seldila dan Niki (2015), Maharani dan Suardana (2014), Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **5. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian ( $H_5$ ) ditolak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG*) tidak menjamin perusahaan itu melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan audit yang dilakukan KAP lebih tertuju pada audit laporan keuangan, dimana audit laporan keuangan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan tidak sampai mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan khususnya kecurangan dalam perpajakan yang salah satunya yaitu penghindaran pajak. Sedangkan

yang lebih berwenang dalam mengukur ada tidaknya kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu auditor forensik. Audit forensik bertugas untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk memberikan keterangan di pengadilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah (2014) yang menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *the big four* (*Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG*) memang akan lebih cenderung dipercayai oleh fiskus karena KAP tersebut memiliki reputasi yang baik, memiliki integritas yang tinggi, namun jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP yang mempunyai reputasi yang baik, bisa saja KAP tersebut melakukan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan KAP. Saputra dkk (2015) dan Pranata (2014) juga menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebab perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four belum tentu dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Maharani dan Suardana (2014), dan Dewi dan Jati (2014) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.